



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025



Jl. Ronggowarsito No. 14 Sumbergedong, Trenggalek
Kode Pos : 66315



perikanan.trenggalek.go.id

DINAS PERIKANAN KABUPATEN TRENGGALEK

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah banyak mengaruniakan nikmat- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai visi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, pelaporan, evaluasi dan analisis kinerja secara menyeluruh dan terpadu.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Trenggalek pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Trenggalek, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Perikanan



Ir. CUSI KURNIAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680129 199202 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021 – 2026, pembangunan kelautan dan perikanan di Trenggalek akan diarahkan sesuai Visi Kabupaten Trenggalek yakni **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”**. Sedangkan Misi dari Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

1. Memastikan UMKM naik kelas serta membangun tata niaga sektor pertanian dan perikanan yang inklusif, mendorong investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan wirausahawan baru yang berorientasi pada langkah pengentasan kemiskinan dan ekonomi pesantren;
2. Mewujudkan Trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa;
3. Mewujudkan pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan Gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, khususnya pelayanan adminduk, pendidikan dan Kesehatan berbasis big data (satu data besar);
4. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan.

Dan Misi yang diemban oleh Dinas Perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah Misi ke-1 (satu) yakni Memastikan UMKM naik kelas serta membangun tata niaga sektor pertanian dan perikanan yang inklusif, mendorong investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan wirausahawan baru yang berorientasi pada langkah pengentasan kemiskinan dan ekonomi pesantren;

Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2021 -2026 adalah Meningkatkan daya saing produk perikanan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Sedangkan Sasarannya adalah

Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan dan Meningkatkan Konsumsi Ikan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai akhir tahun 2025 Dinas Perikanan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus sebagai ASN sebanyak 70 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 33 orang dan PPPK sebanyak 37 orang. Total dukungan anggaran sebesar untuk Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 5.608.378.665.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD dari periode 2021 – 2026 dengan arah tujuan pembangunan yakni Meningkatkan daya saing produk perikanan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Sedangkan sasaran strategisnya adalah Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan dan Meningkatkan Konsumsi Ikan masyarakat.

Arah pembangunan kelautan dan perikanan diimplementasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator kinerja Nilai Tambah Hasil Perikanan

Penjabaran dari sasaran strategis pembangunan di sektor kelautan dan perikanan terwujud dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang dapat diraih pada Tahun 2025 yaitu :

1. Jumlah Produksi Ikan tercapai 53,72%
2. Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercapai 96,95%
3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tercapai 98,77%
4. Angka Konsumsi Ikan tercapai 115,28%*

Setiap individu di lingkungan masyarakat pada dasarnya memiliki kesempatan dalam pembangunan dengan tidak membedakan suku, agama, ras maupun jenis kelamin. Meski begitu, kesenjangan masih

terjadi dalam proses pembangunan yang dilaksanakan seperti pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pekerjaan, kedudukan politik dan tingkat pendidikan sehingga perlu adanya perhatian ke arah pembangunan gender.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan langkah untuk menyelesaikan permasalahan gender dalam masyarakat melalui serangkaian perencanaan sehingga alokasi anggaran dalam program dan kegiatan pembangunan tersebut mampu mendukung kesetaraan kesetaraan gender dalam pembangunan bangsa. Pemanfaatan anggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender inilah yang disebut sebagai anggaran responsive gender.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Gambaran Umum.....	2
I.3. Isu – Isu Strategis.....	13
I.4. Landasan Hukum.....	14
I.5. Sistematika penulisan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
II.1. Perencanaan Strategis.....	17
II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	22
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
II.4. Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
III.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	26
III.2. Analisis Capaian Kinerja.....	29
III.3. Realisasi Anggaran.....	41
PENUTUP.....	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	3
1.2 Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Nama PD Tahun 2025.....	4
1.3 Barang yang Dikelola Dinas Perikanan Tahun 2025.....	4
1.4 Tabel permasalahan dan isu strategis Dinas Perikanan	13
2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025.....	18
2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.....	22
2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kab. Trenggalek Tahun 2025	24
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	25
3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025.....	27
3.2 Analisis Capaian Kinerja	30
3.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025	30
3.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025	31
3.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan	38
3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2025	41
3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran.....	43
3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran	44

DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagian Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kab. Trenggalek.....	12
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek;
2. Mendorong Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.
5. Sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan/perencanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kinerja Dinas Perikanan pada tahun-tahun selanjutnya

I.2. Gambaran Umum

Berisi tentang gambaran umum tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Struktur Organisasi; Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah; Sarana Prasarana Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan bidang perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi ;

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan pemerintahan bidang perikanan;
3. Pelaksanaan program dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Pengelola pendapatan asli daerah sesuai fungsi dinas;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
8. Penyusunan perjanjian kinerja
9. Penetapan dan pelaksanaan standart pelayanan dan standar operasional prosedur

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perikanan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 70 orang (data sumber per Desember Tahun 2025) yang terdiri dari PNS sebanyak 33 orang dan PPPK sebanyak 37 orang sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia

Karyawan / karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek tahun 2025 berjumlah 33 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<i>Menurut Golongan</i>			
1	Golongan I	-	Orang
2	Golongan II	6	Orang
3	Golongan III	21	Orang
4	Golongan IV	6	Orang
	Jumlah Total	33	Orang
<i>Menurut Pendidikan</i>			
1	Pasca Sarjana	6	Orang
2	Sarjana	11	Orang
3	Diploma (D-III)	6	Orang
4	Diploma (D-IV)	-	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	10	Orang
6	SLTP/SMP		Orang
7	SD		Orang
	Jumlah Total	33	Orang
<i>Menurut Jenis Kelamin</i>			
1	Laki - Laki		Orang
2	Perempuan		Orang
	Jumlah Total		Orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan, Desember 2025

Komposisi pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek berdasarkan jenis kelamin yakni pegawai PNS laki –laki sebanyak 21 orang, dan perempuan sebanyak 9 orang, sedangkan untuk PPPK laki-

laki sebanyak 3 orang, dan perempuan sebanyak 4 orang.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK
pada Dinas Perikanan Tahun 2025

No.	Jenis Pegawai	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	22	11	33
2	PPPK	28	9	37

Sumber : Bagian Umpeg Dinas Perikanan, Desember Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019

Tabel 1.3
Barang yang Dikelola
Dinas Perikanan Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Tanah	
	Tanah	2 Bidang
2	PERALATAN DAN MESIN	
	a. Alat-alat besar	45 unit
	b. Alat-alat Angkutan	103 unit
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	59 unit
	d. Alat Pertanian	156 unit
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	917 buah
	f. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	87 unit
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	2 unit
	h. Alat Laboratorium	64 unit
	i. Komputer	187 unit
	j. Alat Keselamatan Kerja	20 unit
	k. Peralatan Proses/Produksi	2 unit

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
	a. Bangunan Gedung	74 buah
	b. Bangunan Menara	2 buah
	c. Tugu titik kontrol	11 unit
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
	a. Jalan dan jembatan	8 unit
	b. Bangunan air/irigasi	7 unit
	c. Instalasi	6 unit
	d. Jaringan	- unit
5	ASET TETAP LAINNYA	
	a. Buku Perpustakaan	- buah
	b. Biota Perairan	- ekor
6	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	
	P2T Rehap Gedung Pertemuan BBI	1 paket
	Jumlah Total	

Sumber : Pengelola Barang Dinas Perikanan 2024

I.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

A. Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud memiliki Tugas melaksanakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan anggaran, koordinasi dan sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan

B. Fungsi Dinas Perikanan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan pemerintahan bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan program dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Pengelola pendapatan asli daerah sesuai fungsi dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- h. Penyusunan perjanjian kinerja
- i. Penetapan dan pelaksanaan standart pelayanan dan standar operasional prosedur
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Perikanan
- b. Sekretaris Dinas
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengawasan

d. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

e. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Adapun Struktur organisasi Dinas Perikanan dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perikanan

Penjelasan tugas dan fungsi Jabatan.

- a. Penyusunan kebijakan teknisnUrusan Pemerintahan bidang Perikanan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja;
- j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumahtangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Penjelasan tugas dan fungsi Jabatan.

- a. Merencanakan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang Urusan Pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan Unit Kerja lain terkait dengan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan

- kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengawasan

Penjelasan tugas dan fungsi Jabatan.

- a. menyusun program kerja bidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan, antara lain:
 - 1. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genanganair lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
 - 2. penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
 - 3. penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan berukuran

sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;

4. pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
- e. melaksanakan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
- f. melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

Penjelasan tugas dan fungsi Jabatan.

- a. Menyusun program kerja Bidang pengelolaan perikanan budidaya sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan perikanan budidaya;
- c. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pengelolaan perikanan budidaya;
- d. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan perikanan budidaya;

- e. melaksanakan penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan dalam Daerah;
- f. melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- g. Melaksanakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. Melaksanakan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
- i. Melaksanakan penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil dalam Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan perikanan budidaya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

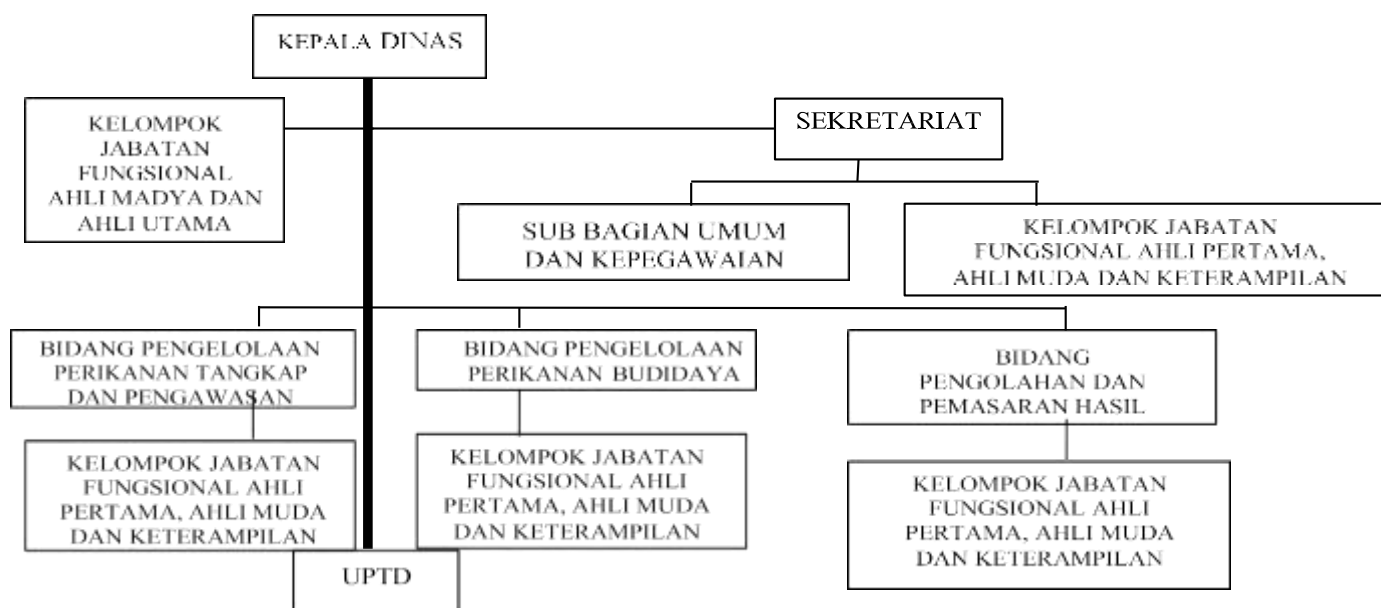
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penjelasan tugas dan fungsi Jabatan.

- a. Menyusun program kerja bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagai penjabaran rencana strategis dinas;
- b. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Melaksanakan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- f. melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- g. melaksanakan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam daerah;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan:

Gambar 1.1
 Bagan Susunan Organisasi
 Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek
 Berdasarkan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan



I.3. Isu – isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek maka dirumuskan isu strategis yaitu :

- a. Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan UPTD TPI dan Belum optimalnya daya saing usaha perikanan tangkap dan budidaya
- b. Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan perikanan
- c. Masih rendahnya angka konsumsi ikan
- d. Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perikanan
- e. Masih adanya usaha perikanan yang belum berwawasan lingkungan
- f. Belum optimalnya pengelolaan asset di bidang perikanan;
- g. Belum optimalnya pengembangan usaha budidaya ikan di perairan umum daratan

Tabel 1.4
Tabel permasalahan dan isu strategis Dinas Perikanan

Permasalahan		Isu Strategis	
1.	a. Masih belum optimalnya fungsi pelayanan Tempat Pelelangan ikan (TPI). b. Masih rendahnya capaian PAD retribusi TPI. c. Masih kurangnya permodalan TPI. d. Masih kurangnya sarana prasarana TPI. Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan UPTD TPI a. Masih rendahnya produksi ikan di perairan umum daratan. b. Harga ikan yang tidak stabil. c. Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan d. Belum optimalnya penggunaan teknologi penangkapan e. Sering terjadinya gagal panen pada usaha budidaya ikan	1.	Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan UPTD TPI Belum optimalnya daya saing usaha perikanan tangkap dan budidaya

Permasalahan		Isu Strategis	
2.	Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perikanan dan kelembagaan perikanan yang meliputi KUB, Pokdakan, Poklahsar dan Pokmaswas	2.	Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan perikanan
3.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan. Masih adanya penggunaan bahan berbahaya dalam usaha pengolahan hasil perikanan, budidaya ikan dan penangkapan ikan.	3.	Masih rendahnya angka konsumsi ikan Masih rendahnya mutu, keamanan, dan daya saing produk olahan hasil perikanan
4.	Masih rendahnya cakupan standarisasi dan legalitas usaha perikanan	4.	Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perikanan
5.	Masih adanya usaha budidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan yang belum dilengkapi dengan IPAL	5.	Masih adanya usaha perikanan yang belum berwawasan lingkungan
6.	Masih adanya asset Dinas Perikanan yang belum termanfaatkan sesuai dengan fungsinya	6.	Belum optimalnya pengelolaan asset di bidang perikanan;
7.	Belum berkembangnya usaha budidaya ikan di perairan umum meliputi bendungan, sungai, waduk, cekdam, dan genangan air lainnya	7.	Belum optimalnya pengembangan usaha budidaya ikan di perairan umum daratan.

I.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Tugas Dinas Perikanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.

I.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja. Bab IV

Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2024 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”. Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Dinas Perikanan mendukung pada misi berikut :

- Misi ke 1 (satu), yaitu :
Memastikan UMKM naik kelas serta membangun tata niaga sektor pertanian dan perikanan yang inklusif, mendorong investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan wirausahawan baru yang berorientasi pada langkah pengentasan kemiskinan dan ekonomi pesantren;

Tabel 2. 1
Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target 2025 dan Satuan
Tujuan : Meningkatnya Daya saing dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan			PDRB sub sektor perikanan	Rupiah
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	95,01 poin 95,68 poin
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		- Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi	100
			- Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
			- Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	95
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	36 Dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Dokumen
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Dokumen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 laporan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
			Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	1. Produksi Perikanan 2. NTN (Nilai Tukar Nelayan) 3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Ton Poin Poin
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	27.935,68 Ton
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap PUD (ton)	25,18 Ton
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5 unit
			Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap laut (ton)	27.910,50 Ton
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	70 orang
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3 kelompok
			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20 unit usaha
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Retribusi TPI (Rupiah)	565.000.000

		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	360 laporan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	5.087,14 Ton
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (orang)	300 orang
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 kelompok
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 kelompok
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7 kelompok
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang difasilitasi sarpras budidaya ikan (Pokdakan)	7 Pokdakan
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 unit
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50 orang
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah sasaran lokasi Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan	19 Lokasi
		Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pokmaswas yang dibina	19 Pokmawas
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai , Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 pelaku usaha

		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikandi Wilayah Sungai , Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20 pelaku usaha
		Sasaran : Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Perka pita/ tahun
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Hasil Perikanan (Rp)	7.297.372.980
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengolah yang difasilitasi TDUPHP	20 Orang
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dokumen
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah ikan yang diolah (Ton)	14.903,49 Ton
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standart pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	60 Unit Usaha
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah ikan yang dipasarkan (Ton)	16.294,10 Ton
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.761,30 Ton
		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	30 pelaku usaha

II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran, yaitu sebagai berikut ;

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin Poin	Nilai SAKIP atas penilaian tahun sebelumnya Penilaian langsung dari masyarakat melalui aplikasi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Inspektorat Dinas Perikanan Kab. Trenggalek
2	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	1. Produksi Perikanan	Ton	Jumlah Produksi Perikanan = Produksi Perikanan Budidaya + Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Kab. Trenggalek
		2. NTN	Poin	$NTN = \frac{Y_t}{E_t} \quad Y_t : \text{Total pendapatan nelayan dari usaha perikanan periode } t$ $E_t : \text{Total pengeluaran nelayan periode } t$	
		3. NTPi	Poin	$NTPi = \frac{Y_t}{E_t} \quad Y_t : \text{Total pendapatan pembudidaya ikan dari usaha perikanan periode } t$ $E_t : \text{Total pengeluaran pembudidaya periode } t$	
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Perkapita/tahun	Konsumsi Ikan Harian (konsumsi ikan dalam rumah tangga + konsumsi ikan luar rumah tangga + $\frac{\text{konsumsi ikan tidak tercatat}}{1000}$ gram)	Susenas

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2025 dan tidak mengalami perubahan selama 1 tahun penuh :

Tabel 2. 3
Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.	Nilai SAKIP	95,01 (AA)
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,68
2.	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	1.	Jumlah produksi perikanan	33.032,06 ton
		2.	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	119
		3.	NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	108
3.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat		Angka Konsumsi Ikan (AKI)	42,1

Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025 yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025 ini.

II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.503.382.572	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.024.281.730	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.398.266	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.271.599	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.374.828	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.056.149	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	604.671.726	
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	13.681.100	
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	346.241.817	
Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	244.748.809	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	836.014.450	
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	235.706.000	
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	600.308.450	Tagging PPRG
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	79.502.811	
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	79.502.811	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	481.006.883	
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5.000.000	

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tagging PPRG
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	317.865.533	Tagging PPRG
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	158.141.350	Tagging PPRG
JUMLAH	8.504.578.442	

Kegiatan-kegiatan yang diampu oleh di Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, selalu mendukung program-program utama yang dicanangkan oleh Kabupaten Trenggalek, salah satunya adalah Program Pengarusutamaan Gender, beberapa kegiatan yang mendukung Pengarusutmaan Gender antara lain adalah :

1. Kolega (Kolam Lele Keluarga) pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
2. Kegiatan Peningkatan Produk Nilai Tambah (PPNT) pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
3. Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) pada Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Wirausaha Baru (WUB) sektor perikanan pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja 2025

Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perikanan Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan merupakan kinerja tahun ke-5 (lima) pada periode Renstra Dinas Perikanan Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 94,12% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Dinas Perikanan
Kabupaten Trenggalek**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	95,01	-	-	-	-	92,38 (atas penilaian tahun 2024)	97,23%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,68	97,79	95,76	94,75	94,49	98,75	103,21%%
2.	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah produksi perikanan	33.032,06	1.922,94	4.904,01	8.424,32	2.493,68	17.744,95	53,72%
		NTN (Nilai Tukar Nelayan)	119	-	-	-	115,37	115,37	96,95%
		NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	107	-	-	-	105,68	105,68	98,77%
3.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	42,21	-	-	-	42,21	48,66*	115,28%

*Capaian Tahun 2024 untuk capain 2025 menunggu data *Susenas*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak - target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 4 target;

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Faktor pendorong :

- Kemudahan dalam akses pelayanan EXSTAR
EXSTAR merupakan aplikasi layanan untuk mengakses BBM bersubsidi kepada nelayan yang dikeluarkan oleh BPH Migas, untuk mendapatkan surat keterangan Pembelian BBM jenis Pertalite dan solar.
- Ketersediaan BBM subsidi yang mencukupi untuk operasional nelayan
- Pembudidaya ikan yang melakukan padat tebar yang tinggi
- Harga komoditas ikan budidaya air tawar yang cenderung stabil
- Pembudidaya ikan sudah mulai menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
- Adanya pelayanan MAS KOKI dari Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
MAS KOKI (Monitoring Kualitas Air Kolam Budidaya, Obat Kimia dan Bahan Biologi) merupakan sebuah inovasi pelayanan untuk pembudidaya dan pembenih ikan yang lebih cepat, mudah dan efisien dalam upaya meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan meminimalisir terjadinya penyakit ikan. MAS KOKI memiliki 3 pelayanan unggulan, yaitu :
 1. Monitoring Kualitas Air
 2. Monitoring Hama dan Penyakit Ikan
 3. Monitoring OIKB (Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi)
 4. Pembudidaya Ikan cukup mengakses

permohonan monitoring budidaya melalui aplikasi MAS KOKI dengan bantuan penyuluh perikanan, kemudian Tim MAS KOKI akan datang langsung untuk melakukan monitoring.

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan semakin tinggi
- Adanya Program khusus penanganan anak stunting yang salah satu dengan pemberian ikan segar dan olahan ikan

B. Faktor penghambat :

- Musim ikan yang singkat sehingga hasil tangkap laut menurun
- Gelombang tinggi, angin laut kencang dan arus laut yang deras sehingga nelayan banyak yang tidak melaut.
- Musim kemarau yang agak lama sehingga banyak sungai yang debit airnya kecil yang menyebabkan hasil tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD) mengalami penurunan
- Harga pakan yang terus mengalami kenaikan harga
- Masih terbatasnya cakupan intervensi anak stunting
- Data anak stunting yang masih tersebar di pelosok sehingga perlu waktu yang lebih lama dalam fasilitasi kegiatan

Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra 2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,5	89,5	91,65	95,01	90,25	91	88,36	91,62	95,01	92,38	100,98	102,37	103,67	97
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,5	87	97,60	95,68	95,80	96	86,61	97,51	95,68	98,95	100,13	112,08	98,03	103
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan	31.137,99	31.732,47	33.032,06	33.022,82	27.950,26	29.303,97	18.685,54	33.032,06	26.807,83	17.744,95	60,01	104,10	81,16	53,72
	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	117,5	118	118,63	119	115,5	117	117,05	118,12	118,83	115,37	99,62	100,10	100,17	96,95
	NTPi (Nilai Tukar pembudidaya Ikan)	105,5	106	107	107	105,70	106,3	104,34	107,23	106,84	105,68	98,90	101,16	99,85	98,77
Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	31,65	31,81	41,3	42,21	42,21	43,5	31,71	41,21	41,21*	48,66*	100,19	129,55	99,78	115,28

*Nilai Angka Konsumsi capaian tahun 2024, untuk 2025 menunggu rilis dari **SUSENAS**

III.1.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	Sasaran Jangka Menengah	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,5	89,5	91,65	95,01	95,01	88,36	91,62	95,01	92,38	100,98	102,37	103,67	97

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Ketersediaan dokumen pendukung dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pelaporan
- (2) Adanya dokumen pendukung kinerja individu sehingga setiap ASN mempunyai target kinerja yang jelas
- (3) Adanya perbaikan data dukung kinerja atas tindak lanjut dari Evaluasi SAKIP

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Adanya data dukung dalam pelaksanaan kinerja yang masih belum tersedia lengkap
- (2) Ada target kinerja yang belum mencapai target di karena faktor-faktor luar terutama faktor alam

Upaya yang dilakukan di tahun 2025 untuk meningkatkan/mempertahankan

- (1) Pemenuhan data dukung atas tindak lanjut evaluasi SAKIP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	Sasaran Jangka Menengah	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,5	87	97,60	95,68	95,68	86,61	97,51	95,68	98,95	100,13	112,08	98,03	103

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. IKM juga berfungsi sebagai indikator yang mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diterima.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Adanya kepuasan masyarakat tentang layanan publik
- (2) Kemudahan-kemudahan dalam akses pelayanan
- (3) Adanya aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Keterbatasan petugas dalam hal pelayanan

Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan

- (1) Pengembangan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan

III.1.2. 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada Dinas Perikanan (jika satu sasaran terdapat lebih dari 1 indikator)

III.2.2.2 Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Tabel 3.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	Sasaran Jangka Menengah	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan	31.137,99	31.732,47	33.022,82	33.032,06	32.328,93	18.685,54	33.032,06	26.807,83	17.744,95	60,01	104,10	81,16	53,72

Produksi perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Ini mencakup pengelolaan sumber daya hayati perairan yang tidak hanya terbatas pada ikan, tetapi juga amfibi dan berbagai avertebrata penghuni perairan.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Kemudahan dalam akses pelayanan PAS TENAN dalam mendapatkan rekom BBM
- (2) Ketersediaan BBM subsidi yang mencukupi untuk operasional nelayan
- (3) Pembudidaya ikan yang melakukan padat tebar yang tinggi
- (4) Harga Komoditas Ikan Budidaya air tawar cenderung stabil
- (5) Pembudidaya ikan sudah mulai menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
- (6) Adanya pelayanan Mas Koki dari Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Musim ikan yang singkat sehingga hasil tangkap laut menurun
- (2) Musim kemarau yang agak lama sehingga banyak sungai yang debit airnya kecil yang menyebabkan hasil tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD) mengalami penurunan
- (3) Harga komoditas ikan budidaya air tawar mengalami penurunan
- (4) Harga Pakan Pabrik terus mengalami kenaikan

Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan

- (1) Memberikan fasilitasi bantuan sarana penangkapan bagi nelayan kecil
- (2) Memberikan fasilitasi bantuan sarana budidaya bagi pembudidaya ikan
- (3) Melakukan restocking di Perairan Umum Daratan (PUD)
- (4) Melakukan Bimtek bagi nelayan dan pembudidaya ikan

Tabel 3.3.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	Sasaran Jangka Menengah	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	117,5	118	118,5	119	118,5	117,05	118,12	118,83	115,37	99,62	100,10	100,17	96,95

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan. NTN merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli nelayan. Selain itu, NTN juga digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan nelayan terhadap barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Kemudahan dalam akses pelayanan PAS TENAN dalam mendapatkan rekom BBM
- (2) Ketersediaan BBM subsidi yang mencukupi untuk operasional nelayan

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Musim ikan yang singkat sehingga hasil tangkap laut menurun
- (2) Gelombang tinggi, arus laut yang deras dan angin laut kencang mempengaruhi aktivitas nelayan

Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan

- (1) Meningkatkan pelayanan EXSTAR dan Rekom BBM bagi nelayan
- (2) Memberikan fasilitasi bantuan sarana penangkapan bagi nelayan
- (3) Mengadakan Bimtek bagi nelayan

Tabel 3.3.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	Sasaran Jangka Menengah	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	NTPi (Nilai Tukar pembudidaya Ikan)	105,5	106	107	107,5	106,5	104,34	107,23	106,84	105,68	98,90	101,16	99,85	98,77

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan pembudidaya ikan. Indeks NTPi menggambarkan proporsi harga yang diterima (IT) dan harga yang dibayar (IB) rumah tangga pembudidaya ikan.

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Pembudidaya ikan yang melakukan padat tebar yang tinggi
- (2) Pembudidaya ikan sudah mulai menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
- (3) Adanya pelayanan Mas Koki dari Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Harga komoditas ikan budidaya air tawar mengalami penurunan
- (2) Harga Pakan terus mengalami kenaikan

Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan

- (1) Memberikan Fasilitas Bantuan Sarana Budidaya Ikan
- (2) Pendampingan untuk mendapatkan sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi pembudidaya ikan
- (3) Mengadakan Bimtek bagi pembudidaya ikan

III .2.2.2. Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat

Tabel 3.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	Sasaran Jangka Menengah	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	31,65	31,81	41,3	42,21	42	31,71	41,21	48,66	48,66*	100,19	129,55	99,78	115,28

***Angka Realisasi tahun 2024 capaian tahun 2025 menunggu data Susenas**

Angka Konsumsi Ikan (AKI) adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Upaya yang dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan Gemarikan
- (2) Fasilitasi Pemberian Paket Gemarikan berupa ikan segar dan olahan dari ikan
- (3) Fasilitasi pemberian paket Gemarikan dilaksanakan di Kecamatan-kecamatan dengan angka anak stunting yang tinggi

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Masih terbatasnya cakupan intervensi anak stunting
- (2) Data anak stunting yang masih tersebar di pelosok sehingga perlu waktu yang lebih lama dalam fasilitasi kegiatan

Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan

- (1) Memperluas cakupan kegiatan Gemarikan
- (2) Bimtek pengolahan ikan

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	97,23%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi - Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Persentase nilai aset dalam kondisi baik	- 100% - 100 % - 95%	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	103,21%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan diselesaikan	100%	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
2.	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah produksi perikanan	53,72%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	12.646,49 Ton	Menunjang
		NTN (Nilai Tukar Nelayan)	96,95%	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap PUD (ton)	23,31 Ton	
		NTPi/ Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	98,77%	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap laut (ton)	12.623,18 Ton	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	5.088,46 Ton	Menunjang
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (orang)	300 orang	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang difasilitasi sarpras budidaya ikan (Pokdakan)	15 Pokdakan	
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah sasaran lokasi Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan	19 Lokasi	Menunjang
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pokmaswas yang dibina	19 Pokmaswas	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
3.	Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	115,28*	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tambah Hasil Perikanan (Rp)	Rp. 6.599.426.217	Menunjang
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengolah yang difasilitasi TDUPHP	1 dokumen	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah ikan yang diolah (Ton)	11.654,23 Ton	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ikan yang dipasarkan (Ton)	13.407,95 Ton	

* Realisasi tahun 2024, capaian tahun 2025 menunggu data *Susenas*

Indikator Tujuan Dinas Perikanan Tahun 2025 adalah Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dengan realisasi N/A. Dikarenakan BPS tidak lagi merilis angka PDRB sub sektor Perikanan.

Beberapa kegiatan yang mendukung Pengarusutamaan Gender antara lain adalah :

- Program Kolega (Kolam Lele Keluarga) dimana program Kolega adalah bentuk kegiatan pemberian bantuan sarana budidaya ikan lele kepada masyarakat, dimana program Kolega ini selain mendukung Program Pengarusutamaan Gender juga mendukung penurunan angka Stunting dan Kemiskinan. Program Kolega ini berupa bantuan Kolam bundar, Benih lele dan pakan yang diterimakan kepada keluarga yang mempunyai anak stunting selain itu juga untuk masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan. Dan Program Kolega Ini diampu oleh Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi pemberian bantuan sebesar 4 paket antara lain :

- a) 1 paket ditujukan untuk 7 keluarga stunting di Desa Pucanganak Kecamatan Tugu;
- b) 1 paket ditujukan untuk 13 keluarga miskin di Desa Gayam Kecamatan Panggul;
- c) 2 paket ditujukan untuk 2 kelompok di Desa Kerjo Kecamatan Karanganyar dan Desa Sumberejo Kecamatan Durenan.

- Kegiatan Peningkatan Produk Nilai Tambah (PPNT) dimana kegiatan ini berupa bimbingan teknis kepada ibu-ibu pengolah perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas perikanan. Dan dari Bimtek PPNT ini diharapkan juga ada penambahan ilmu dalam pengolahan ikan, selain itu juga diharapkan mampu menambah pendapatan bagi pelaku usaha pengolahan komoditas perikanan. Kegiatan ini diampu oleh Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil di Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 35 peserta dari UMKM dari berbagai kecamatan.

- Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dimana bentuk kegiatan Gemarikan ini adalah pemberian bantuan berupa Produk olahan ikan dan ikan segar, dengan sasaran penerima adalah anak-anak stunting dan ibu hamil, selain untuk mendukung Program Pengarusutamaan Gender kegiatan ini juga mendukung dalam program penurunan angka stunting di Kabupaten Trenggalek, dan kegiatan Gemarikan ini diampu oleh Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota di Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi kegiatan Gemarikan diantara lain :

- a) 7 paket untuk 7 anak di Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan
 - b) 20 paket untuk 13 anak di Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek dan 7 anak di Desa Sambirejo Kecamatan Durenan
 - c) 50 paket untuk 7 anak di Desa Baruharjo, 9 anak di Desa Sumbergayam, 5 anak dari Desa Sumberjo, 9 anak dari Desa Kamulan, 9 anak di Desa Karangnom Kecamatan Durenan
 - d) 18 paket untuk 18 anak dibagikan pada acara Gebyar Gemarikan dan Senam Sehat (Gemes) di Pasar Pon.
- Wirausaha Baru (WUB) sektor perikanan, dimana kegiatan ini mendukung Program RPJMD yaitu penumbuhan Wira Usaha

Baru Wanita (Female Preneur), pada tahun 2025 Dinas Perikanan melaksanakan Bimtek WUB kepada Perempuan yang sudah mempunyai embrio usaha disektor perikanan, dimana dalam bimtek ini para pelaku usaha sektor perikanan diajarkan cara pemasaran yang baik, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi Digital, sehingga dari Bimtek ini diharapkan para pelaku usaha wanita sektor perikanan dapat meningkatkan volume dan wilayah pemasaran. Kegiatan ini diampu oleh Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota di sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi kegiatan sebanyak 30 peserta dari pengusaha sector perikanan.

III.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perikanan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.504.578.442 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 7.645.084.050 atau sebesar 89,89%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.503.382.572	5.812.700.571	89,38
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.024.281.730	5.336.613.571	88,59
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.398.266	117.175.255	99,81
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.271.599	66.787.000	99,28
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.374.828	77.155.015	98,44
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.056.149	212.969.730	99,49
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	604.671.726	445.519.537	73,68
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	13.681.100	13.259.350	96,92
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	346.241.817	195.722.000	56,53%
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	244.748.809	236.538.187	96,65%

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	836.014.450	829.518.005	99.22%
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	235.706.000	234.295.360	99.40%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	600.308.450	595.222.645	99.15%
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	79.502.811	78.226.650	98.39%
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	79.502.811	78.226.650	98.39%
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	481.006.883	479.119.287	99.61%
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5.000.000	4.892.200	97.84%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	317.865.533	316.862.987	99.68%
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	158.141.350	157.364.100	99.51%
TOTAL	8.504.578.442	7.645.084.050	89.89%

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	95,01/AA	92,38	97%	6.503.382.572	5.812.700.571	89,38%
		Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	95,68	98,95	103%			
2.	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah produksi perikanan	33.032,06	17.734,95	53,72%	1.440.686.176	1.275.037.542	88,50%
		NTN (Nilai Tukar Nelayan)	119	115,37	96,95%			
		NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	108	105,68	98,77%			
3.	Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk perikanan	Angka Konsumsi Ikan	41,3	48,66*	115,28%	481.006.883	479.119.287	99,61%

*Realisasi tahun 2024, capaian tahun 2025 menunggu data *Susenas*

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran dengan Efisiensi Anggaran

Pilihan 2 : Jika Indikator Sasaran **lebih dari 1**

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)	Rata-rata presentase Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	95,01	92,38	97,23	100	6.503.382.572	5.812.700.571	89,38%	1,12
		Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	95,68	98,95	103,21					
2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah produksi perikanan	33.032,06	17.734,95	53,72	83,15	1.440.686.176	1.275.037.542	88,50%	0,94
		NTN/Nilai Tukar Nelayan	119	115,37	96,95					
		NTPi/Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	108	105,68	98,77					
3	Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk perikanan	Angka Konsumsi Ikan	42,21	48,66*	115,28	115,28	481.006.883	479.119.287	99.61%	1,16

*Realisasi tahun 2024, capaian tahun 2025 menunggu data *Susenas*

CATATAN TAMBAHAN

Cara menghitung tingkat efisiensi :

2. Jika sasaran memiliki 1 indikator

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{presentase capaian indikator}}{\text{presentase realisasi anggaran}} \times 100$$

3. Jika sasaran memmiliki indikator lebih dari 1

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{rata - rata presentase capaian indikator}}{\text{presentase realisasi anggaran}} \times 100$$

Kategori nilai tingkat efisiensi :

- b. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
- c. Jika = 1 maka impas
- d. Jika > 1 maka efisien

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek Berjalan baik jelaskan capaian apakah sudah berhasil/belum, hal ini bisa terlihat sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) ada yang tidak mencapai target namun realiasinya masih diatas 95%, hal ini menyatakan bahwa hasil kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan bisa dikatakan sangat baik
2. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bawah 90% yaitu Produksi perikanan utamanya produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh alam, dan pengaruh alam tidak dapat di kontrol.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja antara lain :

1. Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan nilai SAKIP
 - Melengkapi data dukung atas tindak lanjut evaluasi SAKIP
2. Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - Pengembangan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan
3. Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan Produksi Perikanan
 - Memberikan fasilitasi bantuan sarana penangkapan bagi nelayan kecil
 - Memberikan fasilitasi bantuan sarana budidaya bagi pembudidaya ikan
 - Melakukan restocking di Parairan Umum Daratan (PUD)
 - Melakukan Bimtek bagi nelayan dan pembudidaya ikan

4. Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
 - Meningkatkan pelayanan EXSTAR bagi nelayan
 - Memberikan fasilitasi bantuan sarana penangkapan bagi nelayan
 - Bimtek bagi nelayan
5. Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
 - Memberikan Fasilitas Bantuan Sarana Budidaya Ikan
 - Pendampingan untuk mendapatkan sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi pembudidaya ikan
 - Mengadakan Bimtek bagi pembudidaya ikan
6. Upaya yang dilakukan di tahun 2026 untuk meningkatkan/mempertahankan nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI)
 - Memperluas cakupan kegiatan Gemarikan
 - Mengadakan bimtek pengolahan ikan

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja APBD Induk dan Perubahan Tahun 2024 (dokumen yang bertanda tangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERIKANAN
Jln. R. Ng Ronggowarsito No. 14 Telp. (0355) 791213, Fax (0355) 796352
TRENGGALEK

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. CUSI KURNIAWATI, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TRENGGALEK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 19 Maret 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku,
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

Ir. CUSI KURNIAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680129 199202 2 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91,65 (AA) poin
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,6 poin
2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	1 Jumlah produksi perikanan	33.032,06 ton
		- Jumlah produksi perikanan tangkap	28.171,90 ton
		- Jumlah produksi perikanan budidaya	4.860,16 ton
		2 NTN (Nilai Tukar Nelayan)	118,5 poin
		3 NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	107,5 poin
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	41,3 kg/kapita /tahun

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.503.983.766	APBD
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 780.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 650.000.000	APBD
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 45.000.000	APBD
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 550.000.000	APBD
JUMLAH		Rp 7.528.983.766	

Trenggalek, Maret 2024

BUPATI TRENGGALEK
Selaku,
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK
Selaku,
Pihak Pertama,

Dr. CUSLIKURNIAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680129 199202 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERIKANAN**

Jln. R. Ng Ronggowarsito No. 14 Telp. (0355) 791213, Fax (0355) 796352
TRENGGALEK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. CUSI KURNIAWATI, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TRENGGALEK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 2 September 2024

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK**
selaku
Pihak Pertama,


Ir. CUSI KURNIAWATI, M.Si
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek
NIP. 03550129 199202 2 001


MOCHAMAD NUR ARIFIN
BUPATI TRENGGALEK
selaku,
Pihak Kedua,

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	91,65 (AA) poin
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,5 poin
2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	1 Jumlah produksi perikanan	33.032,06 ton
		- Jumlah produksi perikanan tangkap	28.171,90 ton
		- Jumlah produksi perikanan budidaya	4.860,16 ton
		2 NTN (Nilai Tukar Nelayan)	118,5 poin
		3 NTPI (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	107,5 poin
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	41,3 kg/kapita /tahun

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.670.385.167	APBD
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 865.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 825.000.000	APBD
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 85.000.000	APBD
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 850.000.000	APBD
JUMLAH		Rp 8.295.385.167	

Trenggalek, 2 September 2024

BUPATI TRENGGALEK
sebagai
Pihak Kedua,


MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK
sebagai
Pihak Pertama,


Ir. CUSI KURNIAWATI, M.Si
Pemuda Muda
NIP. 19680129 199202 2 001